

## PENGARUH PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, *LEVERAGE*, DAN UKURAN PERUSAHAAN PADA PENGHINDARAN PAJAK

Yoanis Carrica Wijayanti<sup>1</sup>  
Ni Ketut Lely A. Merkusiwati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
e-mail: yoanisanis@gmail.com/087860204612

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, *leverage*, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan *effective tax rate* (ETR). Penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan yang bersifat legal. Peran pemerintah untuk melakukan pengawasan yang efektif sangat diperlukan agar penerimaan dari sektor pajak dapat dioptimalkan. Penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah dengan metode *nonprobability sampling* yaitu teknik *purposive sampling*. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 1.319 sampel selama 5 periode. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. *Leverage* berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

**Kata kunci:** Penghindaran Pajak, Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan

### ABSTRACT

*This study aims to obtain empirical evidence influence of proportion independent directors, institutional ownership, leverage, and the size of the company on tax avoidance. Measurement of tax evasion using the effective tax rate (ETR). Tax evasion is an action taken by the taxpayer to reduce the tax burden of companies that are legal. The role of government to carry out effective supervision is necessary for revenues from oil taxes can be optimized. Research conducted on all companies listed in Indonesia Stock Exchange 2011-2015 period. Sample selection is nonprobability sampling method purposive sampling technique. Total sample as many as 1,319 samples during the 5 period. Data analysis technique used multiple linear regression analysis. Results analysis showed the proportion of independent directors on the negative impact of tax avoidance. Institutional ownership has no effect on tax avoidance. Leverage a positive effect on tax avoidance. Company size has no effect on tax avoidance.*

**Keywords:** Tax Avoidance, Propotion of Independent Commissioners, Institutional Ownership, Leverage, and Firm Size

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia selama lima tahun terakhir dari tahun 2011 hingga 2015, sumber penerimaan negara terbesar berasal dari sektor pajak sebesar 75% hingga 85%. Berdasarkan fungsinya, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah serta berfungsi sebagai alat ukur untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2016:4). Maka, pengeluaran negara yang bersifat rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan nasional dibiayai oleh pajak. Pemerintah memakai pajak yang merupakan pendapatan negara untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan dari sektor pajak yang diterima oleh negara Indonesia terdapat selisih dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut yang mendorong pemerintah untuk membuat peraturan untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Penerimaan pajak pada suatu negara dapat menentukan kesejahteraan dan kemajuan dari negara tersebut. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang berkewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Perusahaan membayar pajak

kepada negara karena pajak bersifat memaksa dan apabila perusahaan tidak membayar akan dikenakan sanksi yang merugikan perusahaan.

Penerimaan pajak dalam lima tahun mengalami kenaikan atau pertumbuhan tetapi realisasi penerimaan dan target penerimaan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Target penerimaan pajak yang tidak tercapai tersebut salah satu penyebabnya adalah wajib pajak melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Pengurangan pada jumlah beban pajak yang dibayar akan meningkatkan keuntungan pada perusahaan.

Perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan, mendorong perusahaan untuk mengatur jumlah pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Selain itu, wajib pajak yang telah membayar pajaknya tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pihak pemerintah. Ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan mendorong wajib pajak untuk melakukan pengurangan jumlah pembayaran pajak baik legal maupun ilegal.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi pajak antara lain penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu usaha untuk mengurangi utang pajak yang bersifat legal (*lawful*) dengan menuruti aturan yang ada. (Suandy, 2011:7). Jacob (2014) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.

Pihak fiskus memiliki harapan untuk menerima pemasukan yang sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sedangkan pihak manajemen perusahaan menginginkan laba yang signifikan dengan beban pajak yang rendah. Perbedaan kepentingan timbul karena pihak pemerintah sebagai prinsipal dan manajemen perusahaan sebagai agen memiliki kepentingan yang berbeda. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang harus ditanggung, pajak dapat mengurangi laba perusahaan sehingga perusahaan mencari berbagai cara untuk mengurangi beban pajak tersebut.

Salah satu hal yang dapat memengaruhi penghindaran pajak adalah keberadaan komisaris independen. Karakteristik *corporate governance* yang harus dimiliki perusahaan adalah komisaris independen yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan, mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan membuat laporan keuangan lebih objektif (Kurniasih dan Sari, 2013). Keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan akan dipengaruhi oleh keberadaan komisaris independen dalam perusahaan, termasuk keputusan yang terkait dengan pembayaran pajak yang diharapkan dapat meminimalisir kecurangan yang dapat terjadi. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi yang terkait dengan pembayaran pajak (Putra dan Merkusiwati, 2016).

Komisaris independen memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan pemegang saham publik, maka komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik penghindaran pajak (Harto dan Puspita, 2014). Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat

memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan dan nilai perusahaan (Ying, 2011). Komisaris independen dalam perusahaan dapat memberikan arahan kepada manajer perusahaan untuk mengelola perusahaan dan merumuskan strategi yang dapat dilakukan perusahaan agar lebih baik termasuk dalam menentukan kebijakan mengenai pembayaran pajak yang akan dilakukan perusahaan.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Ardyansah dan Zulaikha (2014) dengan meneliti pengaruh komisaris independen terhadap *effective tax rate* (ETR) yang hasilnya berpengaruh positif karena semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap *agent* akan semakin ketat. Pengawasan yang semakin ketat dari komisaris independen membuat perusahaan melaporkan penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian Hanum dan Zulaikha (2013) yang menyatakan bahwa dengan adanya komisaris independen, maka dalam setiap perumusan strategi perusahaan yang dilakukan oleh dewan komisaris beserta manajemen perusahaan, akan memberikan jaminan hasil yang efektif dan efisien, termasuk pada kebijakan mengenai besaran tarif pajak efektif perusahaan.

Selain komisaris independen, kepemilikan institusional dapat memengaruhi penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Kepemilikan saham mewakili sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung ataupun sebaliknya terhadap

manajemen. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif.

Tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak (Winata, 2014). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Diantari (2016) menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* yang memiliki arti bahwa besar atau kecilnya proporsi kepemilikan institusional tidak membuat praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat dihindari. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Putri (2015) serta Maharani dan Suardana (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kebijakan pendanaan yang mengindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah kebijakan *leverage*. *Leverage* merupakan penggunaan utang yang digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Jumlah utang akan menimbulkan beban tetap yang disebut dengan beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Beban bunga yang timbul akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang akan mengurangi pembayaran pajak sehingga mencapai keuntungan yang maksimal.

Menurut Dharma (2015) semakin tinggi tingkat utang maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Noor *et al.*, (2010) yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan cenderung lebih kecil. Penelitian lain dari Darmawan dan Sukartha (2014) serta Putra dan Merkusiwati (2016) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan juga dapat mengakibatkan terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana besar kecilnya perusahaan dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, seperti log total aktiva, log total penjualan dan kapitalisasi pasar (Handayani dan Wulandari, 2014). Semakin besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan mengindikasikan semakin besar ukuran perusahaan tersebut dan transaksi yang terjadi pada perusahaan tersebut akan semakin kompleks. Hal tersebut yang dapat digunakan dari pihak perusahaan untuk menggunakan celah-celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil yang memiliki sumber daya yang lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Laba yang besar dan stabil yang dimiliki perusahaan berukuran besar cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak dalam perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) serta Siregar dan Widayawati (2016)

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, perusahaan besar akan mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh, sehingga mereka sering menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan teori agensi, kontrak yang efisien dapat terjadi apabila tidak terdapat informasi yang tersembunyi diantara pihak prinsipal dan agen. Apabila agen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan dibanding prinsipal, maka pihak prinsipal dapat melakukan pengawasan dengan kehadiran komisaris independen dalam perusahaan untuk memonitor perilaku agen saat menjalankan tugasnya. Kehadiran komisaris independen dalam perusahaan dapat melakukan pengawasan yang ketat terhadap manajemen sehingga dapat meminimalisir perilaku disfungsi yang dapat terjadi seperti penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Prakosa (2014), menyatakan komisaris independen dapat melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan dalam melakukan perumusan strategi termasuk dalam strategi yang berhubungan dengan pajak. Peningkatan keberadaan komisaris independen dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak. Maka, penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu disimpulkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.



Kehadiran komisaris independen dalam perusahaan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dewan direksi serta memperketat pengawasan terhadap manajemen. Pengawasan tersebut dapat membuat manajemen lebih berhati-hati dalam membuat sebuah keputusan dalam menjalankan perusahaan sehingga aktivitas pengurangan jumlah pembayaran pajak yang dilakukan dengan penghindaran pajak dalam diminimalkan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah.

$H_1$  : Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.

Berdasarkan teori agensi, saat kepentingan antara prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka akan tercipta kontrak yang efisien, sebaliknya ketika prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang berbeda maka kontrak yang efisien tidak dapat terjadi. Jika pihak agen lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan kepentingan perusahaan, pengawasan terhadap pihak agen dapat dilakukan salah satunya dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak di luar perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak di luar perusahaan dapat membantu pihak prinsipal untuk mengontrol perilaku agen dalam perusahaan sehingga perilaku menyimpang seperti penghindaran pajak dapat diminimalisir. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank dan investor luar negeri.

Penelitian yang dilakukan oleh Putranti dan Setiawanta (2015) serta Merslythalia dan Lasmana (2016) menyatakan semakin besar kepemilikan saham oleh investor maka semakin kuat investor untuk mendesak manajer untuk bertindak

sesuai dengan tujuan investor dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dari penelitian terdahulu disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional berperan penting dalam pengawasan kinerja manajemen yang lebih optimal karena mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Semakin besar tingkat kepemilikan institusional perusahaan, maka mengindikasikan semakin besar pula tingkat pengawasan terhadap manajer yang dapat mengurangi terjadinya penghindaran pajak dalam perusahaan serta mengurangi konflik keagenan. Kepemilikan institusional berfungsi sebagai kontrol untuk tindakan yang dilakukan manajemen perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah.

H<sub>2</sub> : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.

Berdasarkan teori agensi, kontrak efisien dalam hubungan keagenan tidak dapat terjadi apabila kepentingan prinsipal dan agen yang bertentangan. Diperlukan pengawasan dari pihak luar perusahaan untuk mengawasi pihak agen. Pihak prinsipal dapat melakukan peminjaman dana dari pihak di luar perusahaan untuk memenuhi keperluan yang dibutuhkan perusahaan. Sebagai kreditur dapat melakukan pengawasan terhadap pihak yang berhutang untuk mengawasi setiap aktivitas yang akan dilakukan. Pengawasan tersebut dapat memengaruhi sikap agen perusahaan, karena semakin banyak pengawasan dalam perusahaan maka agen akan lebih berhati-hati untuk setiap keputusan yang akan ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan Dharma (2015), menyatakan *leverage* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Tingginya tingkat *leverage* akan menurunkan tingkat *tax avoidance* karena semakin tinggi *leverage* maka perusahaan cenderung meningkatkan laba. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Swingly (2015) yang menyatakan *leverage* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

*Leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan untuk melakukan pembiayaan keperluan perusahaan. Rasio *leverage* yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi jumlah pendanaan perusahaan yang berasal dari pihak ketiga dan pihak tersebut dapat melakukan pengawasan yang ketat terhadap manajer perusahaan. Semakin tinggi pengawasan yang dilakukan oleh pihak kreditur dapat membuat manajer perusahaan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah.

H<sub>3</sub> : *Leverage* berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.

Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang berukuran besar dapat menarik perhatian dan pengawasan dari pihak fiskus untuk memberikan pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan teori agensi, kontrak yang efisien dapat terlaksana apabila tidak terdapat perbedaan informasi antara prinsipal dan agen. Penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013), semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Sejalan dengan

penelitian yang dilakukan Ardyansha dan Zulaikha (2014) menyatakan laba yang tinggi yang diperoleh perusahaan memberikan konsekuensi akan semakin tingginya pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

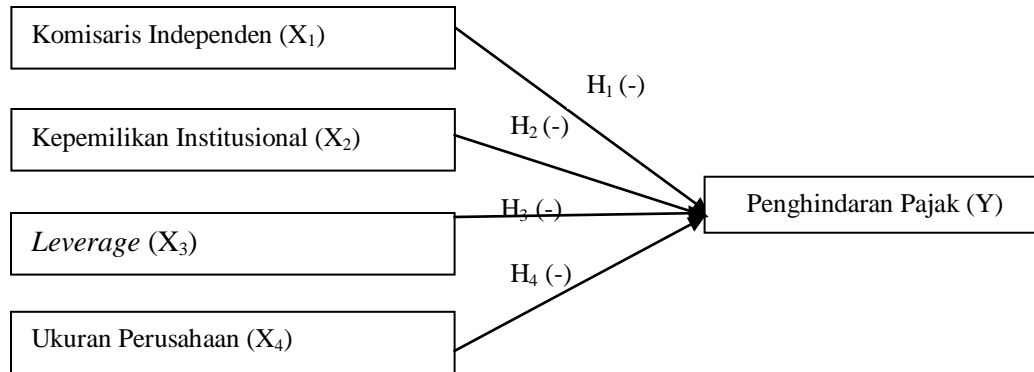
Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan (Putra dan Merkusiwati, 2016). Semakin besar ukuran perusahaan maka akan menghasilkan laba yang besar pula. Pembayaran pajak oleh perusahaan sangat dipengaruhi oleh laba yang diperoleh. Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar dapat mendapatkan perhatian yang besar dari pihak pemerintah sesuai dengan laba yang diperoleh, maka dapat menarik perhatian pihak fiskus untuk memberikan pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Perusahaan dapat mengurangi risiko yang terjadi karena adanya pemeriksaan atau sanksi lain yang dilakukan oleh pihak fiskus dengan mematuhi peraturan yang berlaku sehingga dapat mempertahankan citra perusahaan kepada para investor. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah.

H<sub>4</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen ( $X_1$ ), kepemilikan institusional ( $X_2$ ), *leverage* ( $X_3$ ), ukuran perusahaan ( $X_4$ ) sebagai

variabel bebas dan penghindaran pajak (Y) sebagai variabel terikat. Adapun desain penelitian ini disajikan pada Gambar 1 berikut ini.



**Gambar 1. Desain Penelitian**

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015 dengan mengakses website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Objek dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diproksikan dengan nilai *Effective Tax Rate* (ETR), proporsi k  $H_4$  (-) independen, kepemilikan institusional, *leverage* dan ukuran perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.

Variabel terikat dipenelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan untuk meminimalkan kewajiban pajak yang bersifat legal dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan yang berlaku. Penelitian dilakukan oleh Armstrong dan Blouin (2009) menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR) sebagai pengukuran *tax avoidance*.

Variabel bebas dipenelitian ini adalah proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Komisaris independen

adalah bagian dari dewan komisaris yang berasal dari pihak luar perusahaan. Keberadaan komisaris independen digunakan untuk mendukung efektivitas perusahaan dan monitoring kegiatan yang dilakukan manajer. Proporsi komisaris independen diukur dengan membagi total komisaris independen dengan total anggota dewan komisaris.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi. Kepemilikan institusional diukur menggunakan rasio kepemilikan saham institusional dibagi total saham yang beredar. *Leverage* adalah kemampuan perusahaan menggunakan utang untuk membiayai aktiva, baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Variabel ini diukur menggunakan *debt to total asset ratio* (DAR) untuk mengetahui jumlah aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Ukuran perusahaan digunakan untuk mengetahui tingkat ukuran besar atau kecilnya suatu perusahaan. Pengukuran ukuran perusahaan dalam penelitian ini dengan menghitung *Ln* total aset yang dimiliki perusahaan (De George *et al.*, 2013).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah berupa angka-angka laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah nama-nama perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu data yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015 yang diperoleh dari mengakses website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tercatat di BEI periode 2011-2015. Sampel penelitian ini dilakukan dengan metode *nonprobability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode observasi *non participant* yaitu dilakukan pengamatan pada data laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015 yang bersumber dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) serta buku-buku, skripsi dan jurnal yang terkait untuk dijadikan referensi penelitian.

**Tabel 1.**  
**Hasil Seleksi Sampel**

No	Kriteria	Jumlah
1	Seluruh Perusahaan di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015	2.068
2	Perusahaan yang menggunakan mata uang asing sebagai mata uang pelaporan di laporan keuangan tahunan	(296)
3	Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode pengamatan	(68)
4	Data Outlier	(79)
Jumlah sampel penelitian selama periode pengamatan		1319

*Sumber:* Data sekunder diolah, 2017

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, *leverage*, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. Adapun model persamaan analisis regresi berganda penelitian ini sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)
- $\alpha$  = Konstanta

- $\beta_1 - \beta_4$  = Koefisien Regresi Variabel Independen
- X1 = Proporsi Komisaris Independen
- X2 = Kepemilikan Institusional
- X3 = *Leverage*
- X4 = Ukuran Perusahaan
- $\varepsilon$  = *Error/* Variabel lain yang tidak teridentifikasi dalam model

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi data yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang akan diteliti. Hasil analisis statistik deskriptif masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

No	Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
1	Y	1319	0,000	0,532	0,22201	0,098618
2	X1	1319	0,143	1,000	0,42865	0,116006
3	X2	1319	0,009	1,000	0,69464	0,198870
4	X3	1319	0,000	0,975	0,49651	0,242552
5	X4	1319	22,265	34,445	28,57662	1,837543

*Sumber:* Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa tingkat penghindaran pajak yang diproksikan dengan *effective tax rate* (ETR) pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015 memiliki rata-rata (*mean*) 0,22201 dengan standar deviasi (*standard deviation*) sebesar 0,098618. Perusahaan yang memiliki nilai maksimum ETR sebesar 0,532 yaitu Intraco Penta Tbk (INTA) pada tahun observasi 2012 sedangkan perusahaan yang memiliki nilai minimum ETR sebesar 0,000 yaitu PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET) pada tahun observasi 2014, Intiland Development Tbk (DILD) pada tahun observasi 2015 dan Panin Financial Tbk (PNLF) pada tahun observasi 2015. Variabel proporsi komisaris independen (X<sub>1</sub>)



memiliki rata-rata (*mean*) 0,42865 dengan standar deviasi (*standard deviation*) sebesar 0,116006. Nilai maksimum proporsi komisaris independen sebesar 1,000 dimiliki oleh perusahaan Artahavest Tbk (ARTA) pada tahun observasi 2011 dan 2012. Sedangkan nilai minimum proporsi komisaris independen sebesar 0,143 dimiliki oleh perusahaan Mahaka Media Tbk (ABBA) pada tahun observasi 2011.

Variabel kepemilikan institusional ( $X_2$ ) memiliki rata-rata (*mean*) 0,69464 dengan standar deviasi (*standard deviation*) sebesar 0,198870. Nilai maksimum kepemilikan institusional sebesar 1,000 dimiliki oleh perusahaan Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA), Minna Padi Investama Tbk (PADI), Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR), Tiphone Mobile Indonesia Tbk (TELE) pada tahun observasi 2011, perusahaan PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI) pada tahun observasi 2013, perusahaan PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) pada tahun observasi 2014 dan perusahaan PT Mahaka Radio Integra Tbk (MARI) pada tahun observasi 2015. Sedangkan nilai minimum kepemilikan institusional sebesar 0,009 dimiliki oleh perusahaan Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) pada tahun observasi 2014. Variabel *leverage* ( $X_3$ ) memiliki rata-rata (*mean*) 0,49651 dengan standar deviasi (*standard deviation*) sebesar 0,242552. Nilai maksimum *leverage* sebesar 0,975 dimiliki oleh perusahaan Wahana Pronatural Tbk (WAPO) pada tahun observasi 2012. Sedangkan nilai minimum *leverage* sebesar 0,000 dimiliki oleh perusahaan PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET) pada tahun observasi 2014. Variabel ukuran perusahaan ( $X_4$ ) memiliki rata-rata (*mean*) 28,57662 dengan standar deviasi (*standard deviation*) sebesar 1,837543. Nilai maksimum ukuran

perusahaan sebesar 34,445 dimiliki oleh perusahaan Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) pada tahun observasi 2015. Sedangkan nilai minimum ukuran perusahaan sebesar 22,265 dimiliki oleh perusahaan Plaza Indonesia Realty Tbk (PLIN) pada tahun observasi 2015.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji sebuah model regresi variabel dependen dan variabel independen atau keduanya apakah mempunyai distribusi normal atau tidak. pengujian normalitas data penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov*. Data penelitian dikatakan berdistribusi normal apabila nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar daripada *level of significant* yang dipakai yaitu 0,05 (5 persen). Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3.**  
**Hasil Uji Normalitas**

Model	N	Asymp.sig (2-tailed)
Persamaan Regresi 1	1321	0,053

*Sumber:* Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan uji normalitas yang terlihat pada Tabel 3 menunjukkan nilai signifikan dari model persamaan bernilai 0,053. Hal ini menunjukkan bahwa model persamaan memenuhi uji normalitas karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 yang berarti data terdistribusi secara normal.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya indikasi berupa korelasi antar variabel bebas. Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan *VIF (Variance Inflation Factor)* kurang dari 10, maka hal tersebut menunjukkan model regresi tidak terjadi multikolinearitas. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4.**  
**Hasil Uji Multikoleniaritas**

Model	Variabel	Tolerance	VIF	Ket
Regresi 1	Proporsi Komisaris Independen	0,911	1,098	Bebas Multikoleniaritas
	Kepemilikan Institusional	0,978	1,023	Bebas Multikoleniaritas
	<i>Leverage</i>	0,840	1,191	Bebas Multikoleniaritas
	Ukuran Perusahaan	0,833	1,200	Bebas Multikoleniaritas

*Sumber:* Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 4 nilai *tolerance* dari variabel proporsi komisaris independen sebesar  $0,911 > 0,10$ . Nilai *tolerance* dari kepemilikan instutisional sebesar  $0,978 > 0,10$ . Nilai *tolerance* dari variabel *leverage* sebesar  $0,840 > 0,10$  dan nilai *tolerance* dari variabel ukuran perusahaan  $0,833 > 0,10$ . Nilai VIF ketiga variabel bebas kurang dari 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas tidak saling berkorelasi dan menggambarkan asumsi multikoleniaritas terpenuhi.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5.**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Variabel	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Regresi 1	Proporsi Komisaris Independen	0,984	Bebas Heterokedastisitas
	Kepemilikan Institusional	0,278	Bebas Heterokedastisitas
	<i>Leverage</i>	0,578	Bebas Heterokedastisitas
	Ukuran Perusahaan	0,814	Bebas Heterokedastisitas

*Sumber:* Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel bebas memiliki nilai lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa model regresi linear berganda ini bebas dari gejala heteroskedastesitas.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Hasil pengujian autokorelasi disajikan dalam Tabel 6.

**Tabel 6.**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	,001094	,045		,024	,981
	X1	-,000103	,024	,000	-,004	,997
	X2	-,000367	,013	-,001	-,027	,978
	X3	,000403	,012	,001	,034	,973
	X4	-,000037	,002	-,001	-,023	,981
	RES2	,009279	,028	,009	,336	,737

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 6, nilai signifikan dari Lag2 (*res\_2*) adalah 0,737 lebih besar dari alpha ( $\alpha = 0,05$ ) maka model uji terbebas dari autokorelasi.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, *leverage*, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak Hasil pengujian disajikan pada Tabel 7 berikut ini.

**Tabel 7.**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig	Hasil Uji	
	B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	0,263	0,045				
	X1	-0,089	0,024	-0,105	-3,760	0,000	Diterima
	X2	0,012	0,013	0,025	0,915	0,360	Ditolak
	X3	0,109	0,012	0,267	9,182	0,000	Ditolak
	X4	-0,002	0,002	-0,042	-1,455	0,146	Ditolak
	R Square	0,065					
	F Hitung	23,047					
	Sig. F Hitung	0,000					

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh nilai  $\beta$  pada kolom *Unstandardized Coefficient* sebagai koefisien regresi. Dengan demikian dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots\dots\dots (2)$$

$$= 0,266 - 0,015 X_1 + 0,085 X_2 + 0,027 X_3 - 0,003 X_4 + \varepsilon$$

Nilai konstanta sebesar 0,263 memiliki arti bahwa bila nilai variabel independen (proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, *leverage* dan ukuran perusahaan) tidak ada atau bernilai nol, maka besarnya tingkat penghindaran pajak sebesar 0,263. Nilai koefisien  $\beta_1 = -0,089$  menunjukkan bahwa jika proporsi komisaris independen ( $X_1$ ) mengalami peningkatan sebesar satu persen maka akan terjadi penurunan tingkat penghindaran pajak ( $Y$ ) yang dilakukan perusahaan sebesar 0,089 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Nilai koefisien  $\beta_2 = 0,012$  menunjukkan bahwa jika kepemilikan institusional ( $X_2$ ) mengalami peningkatan sebesar satu persen maka peningkatan tingkat penghindaran pajak ( $Y$ ) yang dilakukan perusahaan nihil dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Nilai koefisien

$\beta_3 = 0,109$  menunjukkan bahwa jika *leverage* ( $X_3$ ) mengalami peningkatan sebesar satu persen maka akan terjadi peningkatan tingkat penghindaran pajak (Y) yang dilakukan perusahaan sebesar 0,109 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Nilai koefisien  $\beta_4 = -0,002$  menunjukkan bahwa jika ukuran perusahaan ( $X_4$ ) mengalami peningkatan sebesar satu persen maka penurunan tingkat penghindaran pajak (Y) yang dilakukan perusahaan nihil dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dalam penelitian ini bisa dilihat pada Tabel 7 bahwa besarnya nilai *R-Square* sebesar 0,065 dan memiliki arti bahwa 6,5% variasi perubahan tingkat penghindaran pajak dipengaruhi oleh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, *leverage*, dan ukuran perusahaan dan sisanya 93,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Uji statistik F digunakan untuk melihat apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji statistik F dalam penelitian ini bisa dilihat pada Tabel 7 diketahui nilai F sebesar 23,047 dengan tingkat hasil signifikansi sebesar 0,000. Hasil tersebut lebih kecil dari nilai  $\alpha = 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa model ini layak digunakan dalam penelitian dan secara serempak variabel proporsi

komisaris independen, kepemilikan institusional, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak.

Uji statistik t bertujuan untuk menunjukkan kemampuan variabel independen yang dimasukkan dalam model yaitu variabel proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, *leverage* dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat dari hasil uji t, proporsi komisaris independen ( $X_1$ ) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti proporsi komisaris independen berpengaruh pada penghindaran pajak. Kepemilikan institusional ( $X_2$ ) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,360 lebih besar dari 0,05 berarti kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. *Leverage* ( $X_3$ ) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti *leverage* berpengaruh pada penghindaran pajak. Ukuran perusahaan ( $X_4$ ) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,146 lebih besar dari 0,05 berarti ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang disajikan pada Tabel 7 menunjukkan koefisien regresi proporsi komisaris independen ( $X_1$ ) sebesar -0,089 nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  memiliki arti proporsi komisaris independen berpengaruh pada penghindaran pajak. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang menyatakan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif diterima.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Prakosa (2014), Diantari (2016) dan Ariawan (2016) yang menyatakan komisaris independen berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Kehadiran komisaris independen dalam perusahaan dapat melakukan pengawasan yang ketat terhadap manajemen sehingga dapat meminimalisir perilaku disfungsional yang dapat terjadi seperti penghindaran pajak. Jumlah komisaris independen yang semakin banyak pada perusahaan maka pengaruh komisaris independen untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen semakin meningkat. Komisaris independen dapat mengawasi manajemen perusahaan agar dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat meminimalisir perilaku penghindaran pajak yang dapat terjadi. Pengawasan yang semakin ketat dilakukan komisaris independen dapat membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, sehingga dapat mengurangi terjadi penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang disajikan pada Tabel 7 menunjukkan koefisien regresi kepemilikan institusional ( $X_2$ ) sebesar 0,012 nilai signifikansi sebesar 0,360 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  memiliki arti kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh negatif ditolak.

Kepemilikan institusional yang merupakan pihak yang dapat memonitor tindakan manajemen perusahaan seharusnya dapat mengawasi dan mempengaruhi manajemen agar dapat menghindari perilaku manajemen yang mementingkan



kepentingannya sendiri. Tetapi ada atau tidaknya kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan belum mampu secara optimal mengurangi tindakan penghindaran pajak. Besar kecilnya kepemilikan institusional pada perusahaan tidak dapat berpengaruh pada penghindaran pajak yang dapat terjadi. Hal ini dikarenakan keikutsertaan kepemilikan institusional melakukan pengawasan dan pengelolaan perusahaan lebih mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris yang merupakan tugas mereka, sehingga ada atau tidaknya kepemilikan institusional penghindaran pajak dapat terjadi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winata (2014), Dewi dan Sari (2015) serta Diantari (2016) yang menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang disajikan pada Tabel 7 menunjukkan koefisien regresi *leverage* ( $X_3$ ) sebesar 0,109 nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  memiliki arti *leverage* berpengaruh pada penghindaran pajak. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yang menyatakan *leverage* berpengaruh negatif ditolak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma (2015), Siregar dan Widyawati (2016) serta Ariawan (2016) yang memiliki hasil penelitian yang sama yaitu *leverage* berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang dilakukan menunjukkan semakin besar *leverage* dalam perusahaan dapat memengaruhi secara signifikan meningkatnya praktik penghindaran pajak yang dapat terjadi. Perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi akan mendapatkan insentif pajak atas beban

bunga yang dapat dimanfaatkan untuk memperkecil beban pajak. Sehingga meningkatnya *leverage* pada perusahaan dapat dikatakan perusahaan tersebut cenderung melakukan praktik penghindaran pajak sebagai akibat dari insentif pajak atas beban bunga yang diperoleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang disajikan pada Tabel 7 menunjukkan koefisien regresi ukuran perusahaan ( $X_4$ ) sebesar  $-0,002$  nilai signifikansi sebesar  $0,146$  lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  memiliki arti ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis keempat ( $H_4$ ) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif ditolak.

Perusahaan besar atau perusahaan kecil tidak dapat berpengaruh pada penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan perusahaan besar atau perusahaan kecil sama-sama patuh untuk tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan tidak ingin mengambil resiko untuk direpotkan dengan proses pemeriksaan atau dikenakan sanksi yang dapat menyebabkan citra perusahaan berdampak buruk dalam jangka panjang. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak fiskus tidak hanya pada perusahaan besar tetapi perusahaan kecil juga dapat menarik perhatian fiskus agar mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku dan dikenakan pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014), Cahyono (2016) serta Merslythalia dan Lasmana (2016) yang memiliki hasil penelitian yang sama yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen, sehingga dapat mencegah keinginan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan maka saran yang dapat disampaikan bagi pihak perusahaan diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap kinerja komisaris independen dikarenakan kehadiran komisaris independen pada perusahaan dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak yang terjadi serta tingkat *leverage* perusahaan yang semakin tinggi dapat membuat meningkatnya tindakan penghindaran pajak. Bagi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi dikarenakan tindakan penghindaran pajak yang akan terjadi semakin meningkat. Bagi peneliti selanjutnya, nilai *R-Square* pada uji koefisien determinasi sebesar 0,052 yang berarti variasi perubahan tingkat variabel dependen (penghindaran pajak) dapat dijelaskan oleh variabel independen (proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, *leverage*, dan ukuran perusahaan) hanya sebesar 6,5%, sedangkan sisanya sebesar 93,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain untuk mempengaruhi penghindaran pajak seperti keberadaan komite audit, preferensi risiko eksekutif, koneksi politik, dan umur perusahaan.

## REFERENSI

- Ardyansah, Danis dan Zulaikha. 2014. Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, CapitalIntensity Ratio* dan Komisaris Independen Terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), pp: 1-9.
- Armstrong, Christopher, Jennifer L. Blouin., dan David F. Larcker. 2012. The Incentives for Tax Planning. *Journal of Accounting and Economics*, 53, pp: 391-411.
- Bovi, Maurizio. 2005. Book Tax Gap, An Income Horse race. *Working Paper No. 61, Desember 2005*, pp: 9-24.
- Cahyono, D.D., Andini, Rita dan Raharjo, Kharis. 2016. Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (*Size*), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011 – 2013. *Journal of Accounting*, 2 (2).
- Darmawan, I Gede Hendy dan Sukartha, I Made. 2014. Pengaruh Penerapan *Corporate Governance, Leverage, Return On Assets*, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9 (1), pp: 143-161.
- De George., C. Ferguson, and N. Spear. 2013. How Much Does IFRS Cost? IFRS Adoption and Audit Fees. *The Accounting Review*, 88 (2).
- Derashid, C., and Zhang, H. 2003. Effective Tax Rates and The Industrial Policy Hypothesis: Evidence from Malaysia. *Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation*, pp: 45-62.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan Jati, I Ketut. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(2), pp: 249-260.
- Dyreng, Scott D, Michelle Hanlon, Edward L. Maydew. 2008. Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), pp: 61-82.
- Eisenhardt, KM. 1989. Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, 14 (1), pp: 57-74.

- Harto, Puji dan Puspita, Ratih Silvia. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), pp: 1-13.
- Jacob, Fatoki Obafemi FCA. 2014. An Empirical Study of Tax Evasion and Tax Avoidance: A Critical Issue in Nigeria Economic Development. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5(18), pp: 22-27.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economic*, 3(4), pp: 305-360.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Mc Guire, Sean; Wang, Dechun; Wilson, Ryan. 2011. Dual Class Ownership and Tax Avoidance. *Journal of the American Taxation Association Midyear Meeting: Jata Conference*.
- Noor, Rohaya Md, Nur Syazwani M.Fadzillah, Nor' Azam Mastuki. 2010. Corporate Tax Planning: A Study on Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 1(2), pp: 189-193.
- Permatasari, Ingrid dan Laksito, Herry. 2013. Minimalisasi *Tax Evasion* melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(2), pp: 1-10.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi xvii*. Mataram, Indonesia, pp: 1-27.
- Pramudito, Batara Wiryo dan Sari, Maria M. Ratna. 2015. Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(3), pp: 705-722.
- Putra, I Gusti Lanang Ngurah Dwi Cahyani dan Merkusiwati, Ni Ketut Lely Aryani. 2016. Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Size dan Capital Intensity Ratio pada *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(1), pp: 690-714.

- Putranti, Annisa Setiawati dan Setiawanta, Yulita. 2015. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Struktur Dewan Komisaris, Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal*. Universitas Dian Nuswantoro.
- Rachmithasari, Annisa Fadilla. 2015. Pengaruh *Return on Assets, Leverage, Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance* (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013). *Naskah Publikasi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rego, Sonja Olhofs and Wilson, Ryan. 2008. Executive Compensation, Tax Reporting Aggressiveness and Future Firm Performance. *Working Paper University of Iowa*.
- Richardson, G., and Lanis, R. 2007. Determinants of Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*. 26, pp: 689- 704.
- Shleifer, Andrei dan Vishny, Robert W. 1997. A Survey of Corporate Governance. *The Journal of Finance*. LII (2), pp: 737-783.
- Siregar, Rifka dan Widyawati, Dini. 2016. Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(2).
- Sukartha, I Made. 2007. Pengaruh Manajemen Laba, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan pada Kesejahteraan Pemegang Saham Perusahaan Target Akuisisi. *Disertasi*. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Swingly, Calvin dan Sukartha, I Made. 2015. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan *Sales Growth* pada *Tax Avoidance*. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(1), pp: 47-62.
- Winata, Fenny. 2014. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4(1).
- Xynas, Lidia. 2011. Tax Planning, Avoidance dan Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance. *Review Law Journal*, 20(1).